



PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT NBP 25 DELI SERDANG SUMATERA UTARA

Eddy Gunawan¹, Javerson Simamora², Edward Harnjo³, Diana Afriani⁴, Gloria Cahaya Julida Hutabarat⁵

Politeknik Unggulan Cipta Mandiri



***Corresponding author**

Eddy Gunawan

Email :

eddygunawan6319@gmail.com

HP: +62 813-7054-2176

Kata Kunci:

Pendampingan;
Penyusunan;
Laporan;
Keuangan;
SAK EMKM;

Keywords:

Accompaniment;
Preparation;
Report;
Finance;
SAK EMKM;

ABSTRAK

Tujuan pengabdian ini adalah untuk membantu Mitra PT. Bank Perkreditan Rakyat NBP 25 Deli Serdang Sumatera Utara yang bergerak di bidang perbankan untuk menyusun laporan keuangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan karakteristik masalah yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini diklarifikasikan sebagai penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung dari pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat NBP 25 Deli Serdang Sumatera Utara seperti data hasil wawancara dengan pihak PT. Bank Perkreditan Rakyat NBP 25 Deli Serdang Sumatera Utara serta data berupa informasi berupa bukti-bukti transaksi-transaksi keuangan selama satu periode. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, internet yang mendukung penelitian ini. Luaran wajib dari hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah proceeding seminar nasional sebagai pemakalah. Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode pendampingan langsung penyusunan laporan keuangan Mitra. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai bagaimana menyusun laporan keuangan PT. Bank Perkreditan Rakyat NBP 25 Deli Serdang Sumatera Utara sesuai dengan Standar Akuntansi EMKM, sehingga Mitra dapat mempraktekkan langsung membuat laporan keuangannya untuk di distribusikan kepada pihak pemegang kepentingan (stakeholder).

ABSTRACT

The purpose of this research is to help PT Partners. People's Perkreditan Bank NBP 25 Deli Serdang, North Sumatra which operates in the banking sector to prepare financial reports. The type of research used is qualitative



research. Based on the characteristics of the problem raised by the researcher, this research is classified as descriptive qualitative research. The data used in this research is primary data obtained directly from PT. People's Percredit Bank NBP 25 Deli Serdang, North Sumatra, as per data from interviews with PT. People's Percredit Bank NBP 25 Deli Serdang, North Sumatra as well as data in the form of information in the form of evidence of financial transactions during one period. Meanwhile, secondary data was obtained from books, journals, and the internet which supported this research. The obligatory output from the results of this Community Service is the proceedings of a national seminar as a speaker. The method used in this activity is the method of direct assistance in preparing Partners' financial reports. This activity is carried out by providing an explanation of how to prepare PT's financial reports. Bank Perkreditan Rakyat NBP 25 Deli Serdang, North Sumatra is in accordance with EMKM Accounting Standards, so that Partners can practice directly making financial reports for distribution to stakeholders.

PENDAHULUAN

Landscape sektor keuangan Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif. Indonesia memiliki populasi usia muda dan dapat memperkirakan besaran keuntungan demografi di masa mendatang (IMF, 2015) dimana populasi usia kerja di proyeksikan mencapai puncaknya sampai 70% di tahun 2030. Pertumbuhan populasi pekerja tentu akan menuntut sejumlah besar barang dan jasa yang lebih kompleks, khususnya layanan keuangan, termasuk hipotek rumah, modal kerja untuk lebih banyak perusahaan baru, pembiayaan ekuitas seiring berkembangnya perusahaan, dan produk keuangan untuk pembagian risiko di antara investor, serta pendapatan yang stabil untuk masa pensiun. Untuk itu, inklusi keuangan menjadi bagian penting dalam proses inklusi sosial ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan antar individu atau antar daerah.

Penduduk Indonesia memiliki kebutuhan yang besar akan layanan keuangan, terutama terkait layanan keuangan dasar yang mencakup tabungan, transaksi pembayaran baik tunai ataupun nontunai, tabungan, kredit atau pembiayaan, dan asuransi. Berdasarkan data Global Findex (World Bank 2017), baru sekitar 48,9% penduduk dewasa di Indonesia yang sudah memiliki rekening dan sekitar 3,1% telah memiliki rekening uang elektronik yang diakses melalui telepon seluler (mobile money) pada tahun 2017. Walaupun angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2014, dimana hanya terdapat 35,9% (tiga puluh lima koma sembilan persen) penduduk dewasa yang memiliki rekening dan 0,4% (nol koma empat persen) penduduk dewasa yang memiliki mobile money, data menunjukkan bahwa akses layanan keuangan di Indonesia masih belum merata atau belum tersentuh akses keuangan.

Selain inklusi keuangan, upaya pendalaman keuangan juga terus dilakukan melalui langkah-langkah untuk terus mendorong ukuran dan likuiditas sektor keuangan, baik dalam hal ini pasar keuangan maupun lembaga keuangan. Selain untuk tujuan memperkuat basis pendanaan domestik untuk investasi, sektor keuangan yang dalam dan likuid dengan instrumen keuangan yang beragam diharapkan mampu menjadi buffer yang kuat terhadap shocks sektor di sektor keuangan.

Melengkapi langkah kebijakan mendorong inklusi keuangan dan pendalaman keuangan, pengembangan sektor keuangan tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Lahirnya Undang-undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) membawa paradigma baru dalam tata kelola stabilitas sistem keuangan Indonesia. Melalui kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang menjadi mandat dari Undang-undang dimaksud, pengelolaan stabilitas sistem keuangan dilakukan dengan mengacu pada praktik standar internasional dalam mengambil tindakan pengamanan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mengatasi permasalahan perbankan Indonesia. Dengan mandat yang jelas diberikan kepada lembaga anggota KSSK yaitu Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan, koordinasi antar lembaga baik dalam kondisi normal (pencegahan krisis) dan kondisi krisis (resolusi krisis) dilakukan secara efektif dan transparan. Melalui triangle approach yaitu perluasan akses keuangan atau

inklusi keuangan, pendalaman sektor keuangan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan domestik, sektor keuangan terus didorong untuk berkembang dan menjadi faktor penting dalam pencapaian target pembangunan ekonomi.

Di bidang perbankan, pada akhir 2020 baru terdapat 14 bank yang full pledged syariah dari total 107 bank umum yang ada di Indonesia, dengan total aset sebesar Rp608,9 triliun atau hanya mencapai 6,52% dari total aset perbankan konvensional yang mencapai Rp9.332,97 triliun. Selain itu, porsi aset perusahaan IKNB syariah relatif masih kecil. Total aset perusahaan asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, dana pensiun syariah, lembaga jasa keuangan khusus (LJKK) syariah, lembaga keuangan mikro (LKM) syariah, serta fintech syariah pada akhir 2020 sebesar Rp110,52 triliun, atau hanya mencapai 2,28% dari total aset IKNB konvensional. Tantangan lainnya di sektor keuangan misalnya timbul dari sektor perbankan yang tidak dapat ditangani dengan menggunakan kerangka kelembagaan yang ada menyebabkan keseluruhan aspek sektor keuangan akan terdampak karena adanya irisan/keterkaitan bisnis antara industri keuangan non-bank dan pasar modal dengan perbankan, yang menambah kompleksitas permasalahan di sektor keuangan sehingga berpotensi meningkatkan ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan. Permasalahan lintas industri jasa keuangan masih terjadi akibat adanya silo antar pengawas sektor jasa keuangan meskipun telah dilakukan oleh pengawas dalam satu atap, sehingga risiko sistemik dari sektor jasa keuangan secara keseluruhan tetap belum dapat terpantau dengan baik.

Untuk itu, guna memitigasi risiko memburuknya kondisi perbankan yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan berdampak pada memburuknya perekonomian, diperlukan upaya yang ditempuh melalui penyempurnaan regulasi, penataan kewenangan, penguatan koordinasi dan mekanisme penanganan perbankan, dan sinkronisasi instrumen, prosedur, dan kebijakan penanganan permasalahan bank di antara lembaga yang berwenang mengawasi, mengatur, dan menangani sektor keuangan khususnya perbankan, pada tataran undang-undang.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang dipakai dalam Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) ini adalah metode pelatihan dengan materi laporan keuangan, dan SAK EMKM, serta pendampingan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Materi yang akan diberikan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat di UD. Budi Sukses Mandiri. terdiri dari:

1. Laporan Keuangan
2. SAK EMKM
3. Penyusunan laporan keuangan

Tahapan metode pelatihan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut terdiri dari:

1. Penjelasan laporan keuangan
2. Penjelasan SAK EMKM
3. Pendampingan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Adapun rencana kegiatan dimulai dengan acara pembukaan, pembagian materi, penjelasan isi materi, dan pendampingan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini didukung penuh oleh perguruan tinggi Institut Bisnis Informasi Teknologi dan Bisnis melalui dana yang

diberikan kepada tim pengusul Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan tim pengusul selama empat tahun terakhir adalah kegiatan yang sesuai dengan spesialisasi bidangnya yaitu Akuntansi Keuangan, Perpajakan, Akuntansi Manajemen, Manajemen Keuangan, dan Audit.

Partisipasi mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah memberikan waktu dan tempat kepada kami tim pengusul agar dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM sehingga jumlah pajak yang disetor ke kas negara sudah tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan dilakukan dengan cara memberikan pendampingan secara langsung kepada Mitra mengenai laporan SAK EMKM. Selain itu, tim LPPM juga memberikan modul pelatihan pendampingan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM kepada Mitra. Setelah Mitra menerima modul pelatihan pendampingan penyusunan dari tim LPPM, serius menyimak terbukti dari respon yang diberikan oleh para peserta sangat antusias untuk bertanya email, dan nomor ponsel tim LPPM mengenai materi di modul LPPM selama LPPM ini berjalan. Di akhir pelatihan, kami diminta Mitra untuk melanjutkan LPPM di tempat Mitra dengan mendampingi Mitra menyusun laporan arus kas (cash flow statement).

KESIMPULAN DAN SARAN

LPPM pelatihan pendampingan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM telah dilakukan dengan baik dan lancar. Topik yang diminati untuk LPPM di kemudian hari adalah kegiatan pelatihan pendampingan penyusunan laporan arus kas (cash flow statement) yang dibutuhkan oleh klien untuk membantu mereka memperoleh pendanaan dari Bank. Kegiatan LPPM di masa depan dapat dilakukan secara berkesinambungan dengan pembekalan topik yang dibutuhkan Mitra seperti yang telah diminta oleh Mitra yaitu pendampingan penyusunan laporan arus kas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. (2017). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.1 Penyajian Laporan Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt, & Terry D. Warfield. (2018). Intermediate Accounting IFRS Edition, 3rd Edition. United States of America: John Wiley & Sons Inc.
- Martani, Dwi. (2012). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil dan Menengah. Jakarta : IAI
- Purnama, Resti. (2018). SAK EMKM 2018. Retrieved from: <http://www.ppak.co.id/dokumen/artikelberita/SAK%20EMKM%202018.pdf>.
- Rachmawati, Diajeng, Amatullah Azizah, Misrin Hariyadi, dan Andrianto. (2019). Analisis Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Batik Jumpat Dahlia Berdasarkan SAK EMKM. Jurnal Balance, XVI(1), 31-52.
- Shonhadji, Nanang, LaelyAghae A., & Djuwito. (2017). Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK EMKM Di Surabaya. Proceeding Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (SENIAS) 2017ting